

# MENGANALISIS KOMPATIBILITAS PENGUKURAN KEMISKINAN DENGAN PERSPEKTIF GENDER

*Laila Kholid Alfirdaus<sup>1</sup>*

## Abstract

*DEBATES about poverty measurement are often rooted on quantitative and qualitative approach. From gender perspective, both has its weakness and strength. In many cases, the synergy of both approaches is proven to be more advantageous in understanding women's poverty. Statistical data on the high figure of women's poverty, for example, could be better explained through ethnographic approach that exposes how gender relation, social cultural construction, and gender inequity have caused their limitation of health, education, and decision making access. Synergy of approaches facilitates understanding of poverty as well as alleviation effort.*

**(Keywords:** Poverty, Methodology, Gender analysis)

## Pendahuluan

MENGUKUR kemiskinan secara kuantitatif menggunakan PPP (*Purchasing Power Parity*), konsumsi kalori perhari, pendapatan perhari, atau daya beli kebutuhan dasar perhari sampai saat ini masih dianggap kompatibel. Alat ukur kuantitatif di atas memudahkan pengukuran, identifikasi akar masalah, dan juga mempermudah solusi kebijakan. Misalnya, jika ukuran kemiskinan adalah pendapatan, maka menentukan akar masalahnya cukup dengan melihat jenis pekerjaan dan upah yang diperoleh. Untuk mengatasinya, dalam jangka pendek,

pemerintah bisa memberikan subsidi atau bantuan langsung tunai.

Memang, jika masalahnya hanya berusaha menemukan alat ukur kemiskinan, tentu menggunakan instrumen kuantitatif saja sudah cukup. Akan tetapi, perkara ukuran kemiskinan ternyata bukan persoalan berapa ukurannya, lalu membuat tingkatan (atas, tengah, dan bawah standar kemiskinan) dan menentukan seseorang apakah termasuk miskin atau tidak. Ukuran kemiskinan terkait erat dengan sebab-sebab sehingga seseorang digolongkan miskin, lalu kebijakan apa yang tepat untuk mengatasinya. Perempuan, misalnya, bisa saja

<sup>1)</sup> Staf pengajar Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Politik dan Ilmu Sosial, Universitas Diponegoro, memiliki minat kaji pada gender dan kebijakan.

akan lebih sering dikategorikan miskin karena konsumsi kalori yang rendah. Kalau kita berkuat pada ukuran kuantitatif saja, tentu tidak cukup. Sedangkan ada banyak penjelasan untuk permasalahan di atas, misalnya konstruksi ‘langsing’ sebagai ‘cantik’, konstruksi sosial yang menempatkan laki-laki (ayah dan saudara laki-laki) untuk didahulukan dalam pembagian makanan dalam keluarga atas nama penghormatan, juga sistem sosial yang memordudakan perempuan untuk mengakses sumber daya (*resources*).

Melalui analisis gender dan keadilan gender, tulisan ini berusaha mengupas kompatibilitas pengukuran kuantitatif kemiskinan dalam konteks masyarakat kita; mendiskusikan kompatibilitas analisis kualitatif kemiskinan, termasuk berbagai kesukaran dan kelebihan; dan terakhir, mendiskusikan kemungkinan menggabung kedua pendekatan dari kaca mata gender dan keadilan gender untuk mendefinisikan kemiskinan, menentukan siapa yang paling miskin, dan kriteria-kriteria penentuan. Analisis gender menjadi salah satu pendekatan penting untuk memahami kemiskinan karena ia menjelaskan akses, kebebasan memilih, kapasitas membuat keputusan (*decision making*), distribusi *power* dan *resources*, serta keterwakilan politik sebagai implikasi dari relasi gender, sehingga perkara pengukuran, siapa yang paling miskin, dan bagaimana mengatasi masalah kemiskinan tersebut menjadi lebih mengena.

## Pengukuran Kuantitatif Kemiskinan

Pengukuran menjadi salah satu aspek penting dalam kajian kemiskinan. *Pertama*,

ia dapat dijadikan standar untuk menentukan siapa yang termasuk dalam kategori miskin serta segmen masyarakat mana yang paling miskin, dan *kedua*, ia menentukan bagaimana masalah kemiskinan itu diatasi (strategi, upaya, dan kebijakan *poverty reduction*). Perdebatan yang tidak pernah usai adalah mengenai bagaimana pengukuran kemiskinan itu didekati. Dikotomi antara kuantitatif dan kualitatif terus berlanjut, meski berbagai upaya menemukan titik temu telah dilakukan, sebagaimana White (2002, hal. 511) ketika mengombinasikan kedua pendekatan sebagai sebuah komplementaritas (yang saling melengkapi).

Banyak orang menggunakan pendekatan kuantitatif karena menganggap pendekatan ini lebih dapat diterapkan dibandingkan dengan pendekatan kualitatif. *Applicable* (dapat diterapkan) artinya pendekatan kuantitatif lebih mudah digunakan untuk menentukan siapa yang masuk dalam kategori miskin dan termiskin, serta bagaimana menentukan kebijakan untuk mengatasi kemiskinan. Para ekonom, misalnya, menggunakan pendekatan kuantitatif untuk menentukan garis kemiskinan (*poverty line*) untuk melihat tingkat kesejahteraan sebuah negara, kemudian menjadikan data statistik tersebut sebagai basis untuk mendukung kebijakan negara dalam mendistribusikan kebijakan sosialnya.

Terkait dengan ini, tingkat pendapatan merupakan aspek terpenting bagi pengukuran kemiskinan dan telah digunakan selama bertahun-tahun. *Low-income* menjelaskan kondisi miskin seseorang yang standar pendapatan harian yang diperolehnya dikategorikan sebagai tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan

secara layak. PPP atau *Purchasing Power Parity*, yang mengukur kemiskinan dari tingkat konsumsi kebutuhan dasar dalam sebuah rumah tangga sebesar \$1 perorang perhari (1985) dan direvisi menjadi \$1.08 pada tahun 1993 (Deaton, 2001, hal. 127), merupakan ukuran yang jamak digunakan. Selain tingkat pendapatan, yang juga digunakan sebagai ukuran kuantitatif kemiskinan adalah konsumsi kalori perhari, dengan standar universal kebutuhan kalori adalah 2000 kalori per orang per hari (hal. 130). Yang dikategorikan miskin adalah mereka yang konsumsi kalori perhari kurang dari 2000. Karena dianggap relatif lebih dapat diterapkan, tepat (*rigorous*) dan memberikan kepastian data statistik, pengukuran kuantitatif sangat populer dan sering menjadi basis penyusunan kebijakan penanggulangan kemiskinan di banyak negara, termasuk Indonesia (misalnya saat mengeluarkan kebijakan Bantuan Langsung Tunai atau BLT). Oleh karena sangat mapannya pendekatan ini, Okin (2003, hal. 281) menyebut pendekatan ini sebagai “*the conservative estimate*”.

Namun demikian, kritik tajam tak lepas dari pendekatan ini. *Pertama*, tidak semua aspek yang mempengaruhi tingkat kemiskinan seseorang dapat diukur. Rendahnya pendapatan, misalnya, pada umumnya diasumsikan disebabkan oleh faktor sulitnya memperoleh pekerjaan. Jika hanya menggunakan pendekatan kuantitatif, tentu kita hanya akan mendapatkan angka sekian rupiah pendapatan seseorang perhari, tanpa pernah tahu mengapa terjadi seperti itu.

Pendekatan kuantitatif jelas tidak memungkinkan untuk melihat apakah sulitnya memperoleh pekerjaan sebagai akar rendahnya pendapatan memang disebabkan tidak ada lapangan pekerjaan, monopoli pihak tertentu terhadap akses pekerjaan, atau fasilitas kredit yang terbatas untuk membuka lapangan usaha (*passive exclusion*), atau memang disebabkan oleh kecenderungan seseorang yang tidak mau aktif mencari pekerjaan, selektif, dan tidak mau mengembangkan lapangan usaha (*active exclusion*).<sup>2</sup>

*Kedua*, apa yang disebut sebagai ukuran kemiskinan, seperti tingkat pendapatan dan rendahnya konsumsi kalori, diyakini hanya merupakan efek ikutan dari sebuah sebab yang lebih mendasar. Penjelasan terhadap sebab tersebut diyakini jauh lebih penting dari sekadar menghitung tampak luar rendahnya tingkat pendapatan dan konsumsi kalori perorang perhari. Sen (2000, hal.3) menegaskan bahwa, meskipun pendapatan merupakan aspek penting dalam kehidupan dan menjelaskan kondisi miskin seseorang, pada dasarnya pendapatan hanya merupakan salah satu aspek saja. Aspek mendasar, yang oleh Sen disebut sebagai *freedom*, justru merupakan basis penjas mengapa seseorang menjadi miskin, termasuk mengapa seseorang tidak bebas dari kekurangan pendapatan.

*Ketiga*, meskipun pendekatan kuantitatif diyakini lebih *rigor* atau akurat, keraguan terhadap kemampuan angka-angka merepresentasikan kondisi yang sesungguhnya tetap saja tidak dapat dihindari. Metode survai maupun sensus sering kali dipercaya tidak

<sup>2)</sup> Penjelasan active dan passive exclusion dapat dilihat dalam Sen, 2000, “Social exclusion: concept, application and scrutiny”, Paper No. 1, ADB.

benar-benar mencerminkan tingkat kemiskinan aktual seseorang karena faktor, misalnya, relativitas perspektif mengenai apakah dirinya termasuk miskin atau tidak, atau bisa jadi karena kesengajaan untuk memberikan data pendapatan yang lebih rendah supaya menghindari pajak pendapatan. Deaton (2005, hal. 1), memberikan contoh tidak sinkronnya pengukuran konsumsi di tingkat nasional dan rumah tangga, di India, Cina, dan Amerika, yang data konsumsi rumah tangganya ternyata lebih lambat (lebih rendah) dibandingkan dengan data konsumsi secara nasional – dengan obyek survai yang sama.

*Keempat*, pendekatan kuantitatif tidak lepas dari perdebatan *replicability* sebagaimana yang diidentifikasi White (2002, hal. 513). Beberapa pihak berargumen bahwa sering kali dengan model yang sama, pendekatan kuantitatif tidak menghasilkan *findings* - temuan-temuan - yang sama, sebagaimana Mosely, Subasat, dan Weeks (dalam White, 2002, hal. 513) ketika mengkritisi laporan kemiskinan World Bank di Afrika (*Adjustment in Africa*). Akan tetapi, White sendiri melihat, jika replikasi dilakukan dengan prosedur yang benar, tentu pendekatan kuantitatif dapat diterapkan di mana saja.

### **Analisis Pengukuran Kuantitatif Kemiskinan dari Perspektif Gender**

Lalu, bagaimana jika pengukuran kuantitatif kemiskinan itu dianalisis menggunakan perspektif gender? Sebagai sebuah konstruksi sosial, gender dan relasi gender menjelaskan hubungan yang rumit antarmatriks sosial, seperti norma, budaya,

kebiasaan, nilai-nilai, dan harapan-harapan sosial yang berimplikasi pada distribusi akses, hak, tanggung jawab, sumber daya, kekuasaan, dan kesempatan, yang lebih lanjut berimplikasi pada tingkat kesejahteraan, kesehatan, dan kelayakan hidup. Moser (1993, hal. 38-54) mencandrakan ini sebagai *strategic* dan *practical gender needs*. *Strategic needs* merupakan kebutuhan gender yang berkaitan dengan relasi kekuasaan yang adil, distribusi akses, kesempatan, tanggung jawab dan sumber daya yang merata, serta pemenuhan hak yang egaliter. *Practical needs* berkaitan dengan *survival* atau kelayakan hidup, seperti akses kesehatan, makanan, air, pendidikan, dan keamanan. Keduanya berkaitan, dan pemenuhan *strategic needs* menjadi prasyarat bagi pemenuhan *practical needs*, dan sebaliknya, pemenuhan *practical needs* menjadi energi bagi penguatan aspek-aspek *strategic needs*.

Kecenderungan penelitian kuantitatif, termasuk pengukuran kemiskinan secara kuantitatif adalah *gender neutral*. Artinya, obyek yang diteliti atau diukur diasumsikan tidak terkait dengan persoalan relasi gender. Data statistik dimunculkan hanya untuk kepentingan memperlihatkan tingkat pendapatan masyarakat untuk begitu saja dijadikan basis pembenaran seseorang termasuk ke dalam kategori miskin atau tidak, tanpa menjelaskan perbedaan kondisi kemiskinan kaum laki-laki dan perempuan secara spesifik. Padahal, jelas konteks yang melingkupi penjelasan mengapa laki-laki dan perempuan menjadi miskin berbeda, dan ini hanya dapat dipahami jika pendekatan pemahaman permasalahan dan pengukuran memperhatikan faktor relasi

dan konstruksi sosial gender. Netralitas pengukuran kuantitatif kemiskinan terhadap isu, masalah, dan relasi gender merancukan realitas kemiskinan sehingga bisa mendorong pada kegagalan memahami persoalan kemiskinan yang sebenarnya.

Disagregasi statistik berdasarkan gender merupakan upaya pendekatan kuantitatif kemiskinan yang patut diapresiasi, karena detail data laki-laki dan perempuan dapat diidentifikasi perbedaannya. Terkait dengan ini, dari berbagai laporan statistik yang ada, disagregasi data itu secara dominan menunjukkan statistik jumlah perempuan miskin lebih banyak dibandingkan dengan jumlah laki-laki miskin. UNDP (United Nations for Development Program), misalnya, secara jelas menegaskan bahwa di antara 1.3 milyar penduduk miskin di dunia ini, 70 persennya adalah kaum perempuan.<sup>3</sup> Jika pendekatan kuantitatif berdiri sendirian, tentu presentasi data ini tidak akan berarti apa-apa karena gagal menjelaskan penyebabnya. Artinya, penggunaan pendekatan kuantitatif terhadap kemiskinan semata—meskipun sudah dilakukan dengan metode disagregasi data -- yang cenderung menghasilkan angka perempuan miskin lebih banyak dibandingkan angka laki-laki miskin, relatif lebih sulit mengidentifikasi berbagai penjelas fakta tersebut karena pendekatannya hanya berbicara mengenai angka. Kenyataannya, berbagai faktor non-numerik mempengaruhi kehidupan perempuan dan menyebabkan mereka menjadi lebih mudah untuk jatuh miskin dibandingkan dengan kaum laki-laki.

Karena hanya berbicara mengenai angka, pendekatan kuantitatif gagal memahami keadaan-keadaan yang sering kali merugikan perempuan. Masalah intinya adalah bagaimana menghitung ketidakadilan, kekerasan, diskriminasi, dan ketidakberdayaan yang diyakini merupakan bagian penting penjelas kemiskinan. Tentu, meleveli tingkat ketidakadilan, ketidakberdayaan, dan sebagainya, jikapun mungkin, bukanlah perkara mudah. Oleh karena itu, meski diyakini tetap berguna, kompatibilitas pendekatan kuantitatif dari perspektif gender tetap saja mengundang pertanyaan.

*Pertama*, pendekatan kuantitatif tidak mampu menjangkau kerumitan sistem sosial yang mengonstruksi perempuan sebagai segmen kedua setelah laki, baik dalam kehidupan keluarga, masyarakat maupun bernegara. Dalam kehidupan keluarga, misalnya, perempuan sering kali tidak didahulukan dalam pembagian makanan. Keluarga juga cenderung mendahulukan anak laki-laki untuk bersekolah daripada anak perempuan. Keluarga juga umumnya merasa lebih aman untuk membolehkan anak laki-laki beraktivitas di luar rumah, seperti dalam olahraga, organisasi sosial dan politik, dibandingkan dengan anak perempuan. Dalam masyarakat, aktivitas komunitas juga lebih sering didominasi oleh kaum laki-laki. Misalnya, paguyuban petani dan pedagang, meski secara nyata kaum perempuan juga memiliki peran dalam pertanian dan perdagangan. Perempuan, sering kali hanya ditempatkan sebagai ‘membantu’ suami, bukan bagian dari pelaku utama.

<sup>3</sup>) Kuliah “Gender and Policy”, Sharon Bessell, Semester ganjil 2008, Master of Public Policy, Crawford School, ANU.

Dalam kehidupan bernegara, perempuan juga menjadi warga negara kedua, terbukti dalam peran-peran marjinal yang senantiasa disandang kaum perempuan, misalnya dalam birokrasi. Menjadi segmen kedua, baik dalam keluarga, masyarakat, dan bernegara berdampak terhadap kemampuan kaum perempuan untuk menjangkau akses ekonomi, sosial, dan politik, seperti makanan, pendidikan, kesehatan, dan pengambilan keputusan, yang selanjutnya berdampak terhadap kelayakan hidup.

*Kedua*, pendekatan kuantitatif juga tidak mampu menjelaskan keterkaitan antara fakta lebih tingginya jumlah kemiskinan perempuan dibandingkan dengan jumlah kemiskinan laki-laki dengan faktor diskriminasi gender, misalnya perbedaan pemberian upah di lapangan kerja. Konstruksi sosial yang menempatkan laki-laki sebagai kepala rumah tangga (*the breadwinner*) seringkali mempengaruhi kebijakan perusahaan untuk menggaji pekerja perempuan lebih rendah dibandingkan dengan pekerja laki-laki. Diskriminasi ini termasuk dalam hal sulitnya kebijakan pemberian dispensasi yang terkait dengan kondisi fisik pekerja perempuan yang lebih rentan dibandingkan dengan pekerja laki-laki, misalnya, karena faktor menstruasi yang bersifat reguler, melahirkan, dan menyusui. Dampak diskriminasi ini jelas akan tampak pada kelayakan akses terhadap makanan, gizi, dan kondisi kesehatan yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi keadaan dan pendataan pekerja sebagai miskin atau tidak miskin.

*Ketiga*, pendekatan kuantitatif sulit memberikan penjelasan mengenai masalah pembatasan akses perempuan terhadap sumber daya (*resources*), pembuatan keputusan (*decision making*), kekuasaan (*power*), maupun hasil (*outcomes*). Bantuan ternak bagi kelompok tani di desa, misalnya, sering kali didominasi oleh warga laki-laki, termasuk juga di dalamnya adalah bantuan pinjaman usaha. Contoh lain adalah dalam hal mikrokredit. Perkembangan program pemberdayaan ekonomi saat ini mungkin sudah mulai menyentuh kaum perempuan sebagai penerima kredit. Akan tetapi, di dalam rumah tangga, pelaksana program sudah tidak bisa lagi mengontrol siapa yang akhirnya memiliki otoritas untuk mengelola pinjaman. Buktinya, di India dan Bangladesh, program penyaluran mikrokredit bagi ibu rumah tangga justru menyebabkan semakin tingginya tingkat kekerasan dan konflik dalam rumah tangga.<sup>4</sup> Kaum laki-laki, yang telah merasa mapan dengan statusnya sebagai *breadwinner*, khawatir perannya akan diambil alih oleh kaum perempuan, atau juga dengan arogansi patriarkinya laki-laki melakukan pemaksaan untuk menguasai uang pinjaman untuk kesenangan mereka sendiri, yang *notabene* sesungguhnya diperuntukkan untuk meningkatkan kapasitas kewirausahaan ibu rumah tangga.

Dalam kasus penyaluran bantuan sembako saat krisis, sebagaimana pada akhir 1990-an, misalnya, memang kaum perempuan dijadikan sebagai target penerima utama. Akan tetapi, sering kali, kenyataan

<sup>4</sup>) Diskusi dalam kuliah Gender and Policy, semester ganjil 2008, Policy and Government Program, Australian National University.



yang kita dapati adalah, setelah sampai di rumah, bantuan makanan tersebut dibagikan terlebih dahulu kepada suami, ayah dari anak-anak, selaku kepala keluarga, anak laki-laki (selaku kepala rumah tangga kedua setelah ayah), baru kemudian kepada anak perempuan, dan sisanya sering kali baru diperuntukkan untuk ibu. Jika perlu, jatah untuk ibu akan diberikan kepada tetangga karena tidak tega melihat mereka masih kekurangan.

Kasus serupa juga sering ditemukan pada keluarga petani pedesaan. Perempuan yang *notabene* juga memainkan peran penting dalam produksi pertanian karena membantu menanam, menyediakan makanan, mengolah dan memasarkan hasil pertanian, sering kali dinomorduakan dalam pembagian hasil, baik berupa makanan maupun keuntungan uang. Laki-laki tetap dianggap sebagai penghasil utama dan memperoleh otoritas pengelolaan keuntungan lebih besar daripada perempuan.

Tidak jauh berbeda adalah perempuan *migrant workers*. Perempuan menjadi tulang punggung keluarga, merantau ke luar negeri, rentan terhadap kekerasan, pelecehan seksual, dan bekerja keras membanting tulang, tetapi hasil yang diperoleh tetap saja diperuntukkan utamanya bukan untuk diri mereka sendiri. Kasus perempuan di Thailand adalah contoh nyata, karena perempuan, atas nama kepatuhan terhadap ayah dan saudara laki-laki mereka, diperintahkan untuk bekerja di luar negeri, tetapi hasil jerih payah mereka dikuasai oleh ayah dan saudara laki-laki mereka. Alasannya, tradisi mewajibkan perempuan untuk membahagiakan keluarga.

Berkaitan dengan ini, World Confer-

ence on Women di Beijing tahun 1995 (dalam Okin, 2003, hal. 284) menyatakan bahwa, “seperempat rumah tangga di dunia ini dikepalai oleh kaum perempuan, dan sebagian rumah pada umumnya (termasuk yang dikepalai oleh laki-laki) menggantungkan hidup mereka pada pendapatan kaum perempuan, meskipun kaum laki-laki ada di dalam rumah tangga tersebut. Kaum perempuan berperan besar dalam menjaga keberlangsungan keluarga, tetapi sering kali menjadi pihak yang masuk dalam kategori paling miskin karena diskriminasi upah, lapangan kerja, dan ketidakadilan gender lainnya”.

Dari berbagai kasus di atas, menjadi jelas bahwa kaum perempuan menjadi tertinggal bukan hanya dalam akses terhadap sumber daya, tetapi juga dalam hal menikmati hasil (Longwe, 1991, Kabeer, 1999). Kondisi *disempowered* (tidak berdaya dan tidak diberdayakan) kaum perempuan seperti ini tentu akan sulit dilacak lebih dalam jika metode pengukuran kemiskinan hanya menggunakan survei atau sensus.

*Keempat*, hegemoni konstruksi sosial yang menuntut tampilan fisik perempuan, yang melihat kesempurnaan dari struktur tubuh yang langsing telah juga mempengaruhi fakta statistik lebih tingginya angka kemiskinan perempuan, terutama yang menggunakan ukuran konsumsi kalori. Pendekatan kuantitatif semata jelas tidak bisa digunakan untuk membedakan apakah konsumsi kalori yang minimal itu adalah sebuah pilihan (supaya tetap langsing) atau sebuah keterpaksaan (sebagai kondisi terpaksa karena memang tidak memiliki penghasilan). Padahal, pilihan atau bukan, bagi pendekatan kuantitatif, fakta bahwa

konsumsi kalori yang sedikit sudah cukup untuk digunakan sebagai basis menentukan seseorang termasuk miskin atau tidak.

Karena berkuat pada angka yang hanya dapat menjangkau aspek-aspek yang bersifat *countable*, pendekatan kuantitatif membatasi elaborasi lebih jauh pencarian data. Sebagaimana Sen (dalam Foster, Greer, dan Thorbecke, 1984, hal. 761), bahkan pemecahan data kuantitatif ke dalam subgrup-subgrup tertentu – etnis, gender, dan geografis- masih tidak cukup karena ada banyak properti dasar kemiskinan – di antara yang disebut Sen adalah *social exclusion*- yang tidak terjelaskan.<sup>5</sup> Pendekatan kuantitatif saja dalam pengukuran kemiskinan sering kali melewatkan akar masalah kemiskinan yang sebenarnya, yang sering kali tidak bersifat numerik dan *non-numerable*, sehingga masalah kemiskinan dan kebijakan pengentasannya tidak bisa bersifat komprehensif. Alternatif pendekatan, meski tetap saja memiliki berbagai kelemahan, diperlukan untuk mempertajam pemahaman, identifikasi masalah, dan penyusunan pengentasan kemiskinan lebih lanjut. Pendekatan kualitatif kemudian menjadi aspek yang tidak bisa dilewatkan dalam memahami masalah kemiskinan.

## Pendekatan Kualitatif Kemiskinan

Adalah tulisan Amartya Sen tentang *social exclusion* (2000) yang menjadi salah satu inspirasi berkembangnya pendekatan

kualitatif pemahaman kemiskinan. Dengan jelas, sebagaimana telah sekilas disinggung di bagian atas tulisan ini, Sen berargumen bahwa kemiskinan bukan sekadar perkara pendapatan yang rendah (2000: 3). Pendapatan rendah sebagai ukuran (*measure*) kemiskinan memang penting. Akan tetapi, aspek lain juga patut diperhitungkan. *Freedom*, atau secara substansi merujuk pada kebebasan memilih, adalah prasyarat *basic* untuk menilai apakah seseorang termasuk miskin atau tidak.

Sen (2000: 4) menunjuk *social exclusion* sebagai penjelas kemiskinan, karena terkait dengan ketidakmampuan seseorang untuk memperoleh akses material (makanan, kesehatan), sosial (pendidikan, keamanan), dan kelembagaan (pengambilan keputusan, partisipasi politik) sehingga membawa seseorang pada kondisi kehidupan yang tidak layak, atau disebut ‘miskin’. Ketidakmampuan itu oleh Sen disebut sebagai *capability deprivation*<sup>6</sup>, atau ketidakmampuan menentukan pilihan hidup – dalam hal bekerja, bersekolah, hidup nyaman, berorganisasi, dan sebagainya- yang artinya seseorang tidak benar-benar menikmati kebebasan (*freedom*) (hal. 3). Mempertegas Sen, Devicienti dan Poggi (2007) berargumen bahwa *human deprivation* tidak hanya terkait dengan tingkat pendapatan. Berbagai masalah seperti segmentasi lapangan kerja bagi laki-laki dan perempuan yang tidak adil, migrasi penduduk, pelanggaran HAM, individualisme dan menurun drastisnya

<sup>5</sup>) Mengenai *social exclusion*, dapat dilihat dalam salah satu artikel Amartya Sen yang berjudul “Social exclusion: concept, application and scrutiny”, Social Development Paper, No. 1, tahun 2000.

<sup>6</sup>) Secara harfiah, *deprivation* diterjemahkan sebagai kekurangan. Tetapi, penulis tidak mengganti istilah asli dalam rujukan dengan kata “kekurangan” untuk menghindari pergeseran makna.



tingkat partisipasi sosial dan politik masyarakat, membutuhkan analisis yang lebih dalam, melebihi dimensi ekonomi (hal. 1). Meski kemiskinan dan *social exclusion* adalah dua hal yang berbeda, keduanya tetap saling terkait dan saling mempengaruhi (hal. 3).

Penjelasan Sen dan pemikir lainnya mengenai kemiskinan, *freedom*, *deprivation* dan *social exclusion* menjadi pijakan penting bagi penajaman pendekatan kemiskinan dengan perspektif kualitatif. Meski dikritik tidak memberikan akurasi, dipertanyakan *sampling*-nya, termasuk tingkat representasi obyek kajiannya, juga penyajian hasil pengukurannya (White, 2002, hal. 513), pendekatan kualitatif kemiskinan dianggap penting karena berbagai hal.

*Pertama*, pendekatan kualitatif memungkinkan elaborasi masalah yang lebih komprehensif. Devicienti dan Poggi (2007, hal. 2) mencontohkan, jika ketidakcukupan pendapatan adalah unsur utama kemiskinan, maka di satu sisi, bisa saja ketidakcukupan itu kita kaitkan dengan peminggiran masyarakat dari akses terhadap lapangan kerja. Akan tetapi, faktanya, belum tentu masyarakat yang diberhentikan (PHK) mengalami ketidakcukupan pendapatan, misalnya, karena sistem pengaman sosial yang dibangun negara maupun perusahaan sangat baik. Di sisi lain, mungkin saja *migrant workers* memiliki pendapatan rendah. Akan tetapi, karena secara sosial terintegrasi dengan baik, mereka mampu memanfaatkan jaringan tersebut untuk strategi pengembangan ekonomi, sehingga secara informal pendapatan mereka berada jauh di atas garis kemiskinan (*poverty line*).

*Kedua*, pendekatan kualitatif mendu-

kung pemahaman masalah dari berbagai perspektif dan konteks atas data yang kita peroleh. Metode etnografis memungkinkan kita mengkaji kemiskinan secara mendalam, terkait dengan konteks sosiologis, budaya, dan antropologis masyarakat. Jika pendekatan kuantitatif menekankan *repliability*, pendekatan kualitatif menekankan sebaliknya. Yang termasuk kategori miskin di suatu tempat, belum tentu termasuk kategori miskin di tempat yang lain. Kepemilikan berbagai properti penduduk miskin di Amerika, seperti mobil, televisi, dan pemukiman, misalnya, sudah cukup untuk melepaskan seseorang di Afrika dari kategori sebagai 'miskin'.

Kasus lain adalah perihal akses terhadap makanan dan kesehatan. Jika pendekatan kuantitatif menggunakan indikator kalori dan akses makanan bergizi untuk menentukan seseorang termasuk miskin atau tidak, maka pendekatan kualitatif dengan metode etnografis dan antropologis, memungkinkan kita untuk melihat perspektif lain kondisi tersebut. Di Zaire, sebagaimana White (2002, hal. 518) mencontohkan, dan banyak negara berkembang lainnya, seseorang tidak mengonsumsi makanan berkalori tinggi, misalnya daging, karena alasan tabu – tradisi.

Dalam hal kesehatan pun demikian. Seseorang yang sakit dan tidak memperoleh perawatan medis, sering kali dianggap miskin karena dianggap tidak memiliki akses terhadap kesehatan. Namun yang sebenarnya terjadi, berdasarkan kepercayaan masyarakat setempat, penyakit cukup disembuhkan dengan mantra dan ritual-ritual tradisional maupun keagamaan. Pendekatan kontekstual yang ditekankan dalam metode

kualitatif lebih memberikan keleluasaan bagi pemahaman permasalahan seperti ini, dengan berbagai perspektif yang relevan dan – tentu saja- relatif, karena konteks sosial, budaya, dan politik tiap-tiap masyarakat berbeda-beda.

*Ketiga*, pendekatan kualitatif memiliki metode yang lebih dinamis dan interaktif sehingga memungkinkan kita memahami hubungan antar-berbagai aspek dan unsur kemiskinan. Sebagaimana Sen (2000: 2), kecenderungan yang ada adalah unsur-unsur kemiskinan itu saling terkait. Jika terpinggirkan dari akses terhadap makanan, maka seseorang akan rentan terhadap masalah kesehatan. Kerentanan ini akan mempersulit orang tersebut untuk memperoleh pekerjaan, sehingga ia akan mudah sekali mengalami ketidakcukupan pendapatan (yang oleh advokat pendekatan kuantitatif disebut sebagai kemiskinan). Ketidakcukupan pendapatan ini akan menjauhkan seseorang dari akses pendidikan, partisipasi sosial dan politik, serta keamanan. Dengan demikian, semuanya saling terkait dan saling mempengaruhi. Pendekatan kualitatif, dengan metode observasi dan investigasi, misalnya, memungkinkan kita untuk mendeteksi hubungan antaraspek yang menyebabkan lingkaran kemiskinan. Berkaitan dengan ini, Devicienti dan Poggi (2007: 6) bahkan menyusun indikator-indikator untuk mempermudah observasi, guna mempermudah analisis dan interpretasi keterkaitan antarberbagai aspek kemiskinan.<sup>7</sup>

Namun demikian, para advokat pendekat-

an kualitatif tetap menyadari bahwa penggunaan pendekatan ini sebagai sebuah metode bukanlah hal mudah. Pengumpulan dan analisis melewati prosedur yang rumit, dan interpretasi sebagai ruh pendekatan ini sangat rentan terhadap terjadinya *misleading* (kesalahpahaman). Karena itu, banyak kalangan menilai bahwa pendekatan kualitatif hanya indah sebagai wacana diskusi, tetapi tidak mudah untuk diturunkan ke level instrumentasi – untuk dikonkretkan dalam hal pengumpulan dan analisis data.

### **Analisis Pendekatan Kualitatif Kemiskinan dari Perspektif Gender**

Lalu, karena kemiskinan perempuan sering kali terkait dengan faktor ketidakadilan, diskriminasi, dan pembatasan yang sifatnya *non-numerable*, apakah secara ser-ta-merta ini berarti bahwa pendekatan kualitatif lebih superior dibandingkan dengan pendekatan kuantitatif? Tentu tidak. Meski analisis gender sering kali bersifat diskursif, bukan berarti pendekatan kuantitatif sama sekali tidak bisa menjawab aspek gender dari kemiskinan, dan pendekatan kualitatif adalah satu-satunya yang kompatibel untuk memahami kemiskinan.

Dalam kasus penyaluran sembako dan mikro kredit, sebagaimana disebutkan di atas, misalnya, pendekatan kualitatif tetap saja sulit menjangkau apa yang sebenarnya terjadi dalam keluarga: interaksi antara suami-istri-anak, pembagian kekuasaan, kerja sama dan sebagainya. Responden,

<sup>7)</sup> Contoh indikator Devicienti dan Poggi (2007: 6) adalah kelayakan tempat tinggal, mencakup pencahayaan, ventilasi udara, ruang yang memadai, dan sebagainya, dikaitkan dengan lingkungan yang bersih dan sehat seperti polusi dan vandalisme, dikaitkan lagi dengan relasi sosial, seperti intensi pertetanggaan, perkumpulan komunitas dan klub, dan sebagainya.

bahkan dengan pendekatan kualitatif yang paling informal dan personal sekalipun, sering kali tidak mau mengungkapkan apa yang terjadi dalam keluarga yang sebenarnya dengan alasan *privacy*, tabu, malu, dan sebagainya. Oleh karena itu, tidak mudah juga menggunakan pendekatan kualitatif untuk memahami kemiskinan perempuan, sehingga analisis pendekatan kualitatif dari perspektif gender pun tidak lepas dari berbagai kerumitan.

Namun demikian, pendekatan kualitatif tetaplah memberikan manfaat bagi pemahaman masalah kemiskinan dari perspektif gender. *Pertama*, dengan metode yang tepat, pendekatan kualitatif memungkinkan elaborasi mendalam bukan hanya ukuran kemiskinan perempuan, tetapi juga faktor-faktor penyebab kemiskinan. Pendekatan kualitatif dapat mengungkap relasi sosial yang menyebabkan perempuan tidak diprioritaskan dalam aspek penting kehidupan (akses terhadap *resources* dan pengambilan keputusan) sebagai salah satu penjelas penyebab kemiskinan perempuan (Whitehead, 2003: 9). Pendekatan kualitatif dapat memberikan data mengenai pengalaman kemiskinan mereka yang secara langsung mengalami (hal. 513), termasuk kaum perempuan: bagaimana konstruksi sosial maupun keterbatasan pilihan hidup membawa mereka pada keadaan miskin. Dengan bertatap langsung dengan responden, *sense* kemiskinan perempuan dapat kita tangkap secara lebih dalam melalui ekspresi dan cara pemilihan kata, misalnya dalam sebuah wawancara atau FGD<sup>8)</sup>, dibandingkan

dengan pendekatan kuantitatif yang secara teknis responden hanya perlu menjawab serangkaian pertanyaan dalam kuesioner dan tatap langsung bukan hal yang pokok dilakukan.

*Kedua*, pendekatan kualitatif juga memungkinkan kita untuk menggali lingkaran masalah sosial yang menyebabkan kemiskinan perempuan. Misalnya, jika salah satu indikator kemiskinan perempuan adalah kesehatan, maka bukan hanya berapa jumlah ibu melahirkan meninggal pertahunnya (*maternal mortality*) yang dapat terlacak, tetapi juga keterbatasan perempuan untuk memilih akses kesehatan terbaik karena konstruksi sosial. Dalam masyarakat tradisional, perempuan dikonstruksi untuk tidak membantah atau patuh pada yang lebih tua, seperti bapak, ibu, termasuk mertua. Ketika mereka yang tua menganjurkan untuk menggunakan jasa non-medis, seperti dukun, untuk keperluan persalinan, yang *nota-bene* berisiko terhadap keselamatan ibu dan bayi, maka perempuan tidak dapat seleluasa mungkin menolak. Kehidupan perempuan sering kali diputuskan oleh orang-orang di luar dirinya, yang atas nama tradisi dan sopan santun, memiliki otoritas terhadap kehidupan perempuan. Keterbatasan pengetahuan, termasuk keterbatasan memilih pelayanan kesehatan, mempengaruhi kelayakan hidup kaum perempuan, sehingga mempengaruhi pula kondisi miskin dan tidak miskin. Pendekatan kualitatif, melalui observasi atau *interview* secara personal dan persuasif, lebih memungkinkan digunakan sebagai metode untuk menggali lingkaran

<sup>8)</sup> Focus Group Discussion, metode pengumpulan data dalam pendekatan kualitatif dengan cara diskusi dengan berbagai segmen masyarakat yang memiliki pengalaman tertentu untuk mendapatkan *shared views*.

masalah semacam ini.

*Ketiga*, pendekatan kualitatif memungkinkan penelitian kasus demi kasus, sehingga problem kemiskinan perempuan yang sangat kontekstual dapat lebih mudah dipahami. Di satu sisi, pendekatan kualitatif memang dikritik kerana soal representasi dan *sampling*, sehingga dipertanyakan validitasnya. Akan tetapi, pada kenyataannya wujud dan bentuk relasi gender yang timpang sering kali berbeda antara satu masyarakat dengan masyarakat lainnya. Tentu saja, representasi dan sampel data yang tepat merupakan faktor penting untuk dapat melakukan generalisasi. Akan tetapi, masalah-masalah spesifik yang polanya tidak mesti secara general ditemukan di dalam masyarakat, akan lebih mudah didekati dengan pendekatan kualitatif, misalnya dengan metode etnografi.

### **Menggabungkan Pendekatan: Mempertajam *Sense* Pemahaman Kemiskinan dari Perspektif Gender**

Melihat bahwa masing-masing pendekatan memiliki kelemahan dan kelebihan, pada umumnya kita akan tergoda untuk menggabungkan pendekatan guna memperoleh pemahaman kemiskinan dari perspektif gender secara lebih komprehensif. Caranya, metode disagregasi statistik kemiskinan, kita perkuat dengan observasi dan investigasi untuk mempertajam analisis dan memudahkan kita menentukan segmen masyarakat mana yang paling miskin. Secara teoretis memang terkesan sempurna. Pertanyaan mendasarnya: apakah mungkin?

Menggabungkan kedua pendekatan memang bukan perkara mudah. Perlu prasyarat

dan prosedur metodologis yang tepat. Alih-alih memperoleh data yang komprehensif, jang-jangan yang kita dapatkan melalui pencampuran pendekatan justru adalah data yang kabur: statistik yang lemah tanpa penjelasan yang kuat. Namun demikian, tidak berarti penggabungan pendekatan tidak mungkin dilakukan. Apa yang telah dilakukan White (2002) menjadi contoh bagi kita bahwa penggabungan kedua pendekatan sangat mungkin. Jika dilakukan dengan metode dan prosedur yang benar, hal itu dapat menguntungkan karena kita akan memperoleh data yang lengkap. Pendekatan kuantitatif dan kualitatif yang saling mendukung dapat membantu kita memahami apa yang terjadi di balik tampilan-tampilan angka statistik, sehingga membantu kita menentukan pendekatan bagi pengentasan kemiskinan (*poverty eradication*).

Pijakan penting bagi White (2002: 511) adalah bahwa pendekatan kuantitatif dan kualitatif tidak semestinya dikonfrontasikan. Keduanya dapat sama-sama digunakan untuk kemanfaatan pendekatan dan pengukuran kemiskinan secara maksimal berdasarkan konteks kebutuhan spesifik pendataan kita. Dalam banyak kasus, sinergi kedua pendekatan menghasilkan penajaman pemahaman karena adanya pengayaan perspektif, termasuk dalam hal memahami kemiskinan perempuan (hal. 513).

Dalam kasus '*missing women*' sebagaimana tulisan Sen (1990, dalam White, 2002: 517) yang berjudul "More than a million women are missing", Sen berargumen bahwa jutaan perempuan meninggal akibat kemiskinan akut. Klaim Sen ini didasarkan data sensus di tujuh negara (Cina, India, Pakistan, Bangladesh, Nepal, Asia Barat,

dan Mesir) pada 1981-1991. Di satu sisi, data kuantitatif Sen mendukung argumen Whitehead (2003: 9) yang mengatakan bahwa ketidakadilan gender telah menyebabkan perempuan lebih berisiko mengalami kemiskinan kronis dibandingkan dengan laki-laki. Di sisi lain, klaim kuantitatif Sen mendorong beberapa peneliti untuk mengungkap kemiskinan perempuan lebih dalam dengan menggunakan pencampuran metode-metode.

Croll (2000, dalam White, 2002: 517), misalnya, menggunakan pendekatan demografis – kuantitatif – dan etnografis – kualitatif – untuk memahami meningkatnya fenomena kematian perempuan (*female mortality*) di Asia, terutama Cina dan India. Croll menyimpulkan bahwa kecenderungan pandangan masyarakat untuk lebih menyukai anak laki (*son preference*) telah menyebabkan diskriminasi terhadap anak perempuan (*daughter discrimination*) sehingga dalam berbagai hal (akses, fasilitas, dan kesempatan), anak laki-laki lebih sering diprioritaskan. Anak laki-laki dianggap sebagai penerus keluarga, simbol keluarga, dan dapat membantu meningkatkan taraf hidup keluarga karena merekalah yang bekerja, yang secara fisik lebih kuat. Beberapa keluarga bahkan memilih untuk membunuh hidup-hidup anak perempuan mereka karena dianggap hanya akan membebani keluarga (hal. 518).

Kasus lain adalah hubungan antara jumlah kemiskinan dengan kepercayaan tradisional. White (200: 518) menyatakan bahwa di Zaire ditemukan data statistik yang mengungkap jumlah perempuan dan anak-anak yang menderita kemiskinan ternyata lebih banyak dibandingkan

dengan jumlah laki-laki miskin. Dengan penelusuran etnografis ditemukan bahwa salah satu penjelas utama penyebab lebih tingginya kemiskinan perempuan dan anak-anak adalah kepercayaan tradisional yang melarang perempuan dan anak-anak untuk mengonsumsi makanan tertentu (misalnya daging) karena dianggap tabu. Larangan ketat mengonsumsi makanan tertentu juga diberlakukan terhadap perempuan yang sedang hamil. Padahal, ibu-ibu menyusui, anak-anak, dan perempuan memerlukan nutrisi yang memadai untuk kesehatan dan keberlangsungan hidup mereka. Menghentikan konsumsi daging atau makanan bergizi lainnya baik sementara maupun seumur hidup atas nama tradisi yang tabu tentu akan mempengaruhi tingkat kesehatan mereka, sehingga akan berpengaruh pula terhadap tingkat kelayakan hidup mereka – termasuk dalam kategori miskin atau tidak.

Terhadap fenomena masyarakat seperti ini, jika hanya mengandalkan satu pendekatan, tentu kita tidak akan dapat memahami permasalahan seperti ini secara komprehensif. Menggunakan metode kuantitatif saja, kita hanya akan terjebak pada angka-angka semata dan berkubang pada keterangan penyebab kemiskinan sebagai akses dari akses gizi yang buruk. Menggunakan pendekatan kualitatif saja juga tidak membantu kita mengetahui jumlah yang tepat berapa perempuan dan anak-anak yang akhirnya menjadi menderita karena konstruksi budaya yang membatasi pilihan hidup mereka. Penelitian Sen maupun Croll memperkuat penjelasan White bahwa sinergi kedua pendekatan dapat membantu kita memahami secara lebih mendalam problem kemiskinan. Dari perspektif gender, sinergi

kedua pendekatan juga memungkinkan kita menggali masalah-masalah yang sering kali tidak kasat mata, seperti konstruksi sosial dan budaya perilaku gender, sehingga kemiskinan – khususnya kemiskinan perempuan – dapat dipahami lebih mendasar.

### **Sinergi Metode untuk Memahami Segmen Masyarakat Paling Miskin**

Dari berbagai kasus di atas, menjadi jelas bahwa metode kuantitatif maupun kualitatif tidak bersifat superior satu terhadap yang lain dalam hal pendekatan dan pengukuran kemiskinan. Masing-masing memiliki kelebihan dan kelemahan, termasuk jika dilihat dari perspektif gender. Penggunaan secara maksimal kedua metode itu sangat tergantung pada kebutuhan spesifik pendataan dan pengukuran yang kita lakukan. Pendekatan kuantitatif yang ruh utamanya adalah *representativeness* serta metode *sampling* memungkinkan kita melakukan generalisasi dan replikasi. Sementara itu, pendekatan kualitatif memungkinkan kita menangkap kerumitan antarmatriks sosial sebagai penjelas penyebab terjadinya kemiskinan.

Sinergi kedua pendekatan, jika dilakukan dengan tepat, sangat dapat membantu kita menghasilkan data yang tajam, karena kedua pendekatan dapat saling melengkapi

dan memperkaya perspektif, sebagaimana ditegaskan oleh Jick (2007: 602). Dalam hal memahami kemiskinan, termasuk kemiskinan perempuan, sinergi pendekatan dapat membantu kita mengidentifikasi segmen masyarakat mana yang paling miskin. Bukan saja mereka yang secara statistik menunjukkan tingkat pendapatan paling rendah, yang terekam dalam angka akses terhadap kesehatan, gizi, dan pendidikan yang paling sedikit, yang termasuk dalam segmen paling miskin. Akan tetapi, juga mereka yang, di satu sisi memiliki tingkat pendapatan dan akses kebutuhan dasar paling sedikit, dan yang di sisi lain, keterbatasan tersebut disebabkan oleh ketiadaan pilihan dalam bentuk konstruksi sosial, diskriminasi dan ketidakadilan, atau yang dalam istilah Sen disebut sebagai *passive exclusion*.

Mungkin terkesan menyederhanakan, tetapi, setidaknya, sinergi pendekatan memungkinkan kita, tidak hanya mengungkap angka kemiskinan paling kronis, tetapi juga penyebab kemiskinan paling kronis, termasuk kemiskinan perempuan. Sangat disadari bahwa sinergi pendekatan memerlukan pemikiran mengenai bagaimana menurunkan dalam instrumentasi supaya dapat diaplikasikan. Terlebih lagi matriks sosial sangat bersifat variatif dan relatif. Untuk itu, penajaman berbagai perspektif kemiskinan menjadi sangat krusial.



## Daftar Rujukan

- Deaton, A. 2005. "Measuring poverty in a growing world (or measuring growth in a poor world)", *The Review of Economics and Statistics*, vol. 87, no. 1, h. 1–19.
- Devicienti, F dan A, Poggi. 2007. "Poverty and social exclusion: two sides of the same coin or dynamically interrelated processes?", *Working Paper* no. 62, LABOR, h. 1-40.
- Foster, J, J. Greer, dan E. Thorbecke. 1984. "A class of decomposable poverty measures", *Econometrica*, vol. 52, no. 3, h. 761-6.
- Jick, T 1979, "Mixing Qualitative and Quantitative Methods: Triangulation in Action", *Administrative Science Quarterly*, vol. 24, no. 4, h. 602-11.
- Kabeer, N. 1999. "Resources, agency, achievements: reflections on the measurement of women's empowerment", *Development and Change*, vol.30, h. 435-64.
- Longwe, SH. 1991. "Gender Awareness: The missing element in the Third World development project", dalam *Changing Perceptions: Writings on Gender and Development*, Tina Wallace & Candida March (eds.), London: Oxfam.
- Okin, SM. 2003. "Poverty, well-being, and gender: what counts, who's heard?", *Philosophy & Public Affairs*, vol. 31, no. 3, hal. 280-316.
- Sen, A. 2000. "Social exclusion: concept, application, and scrutiny", *Social Development Papers*, no. 1, Asian Development Bank, h. 1-54.
- White, H. 2002. "Combining quantitative and qualitative approaches in poverty analysis", *World Development*, vol. 30, no. 3, h. 511–522.
- Whitehead, A. 2003. "Failing women, sustaining poverty: gender in Poverty Reduction Strategy", Report, the UK Gender and Development Network, h. 1-47.